

## **ANALISIS YURIDIS ATAS PERAN NOTARIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PERDAMAIAN**

**MUHAMMAD TAUFIK ATMA**

### ***ABSTRACT***

*A peace treaty as the result of a process of dispute settlement should be in a written form in order to prevent from the reemergence of the same dispute in the future. Therefore, the process can be done outside of the court by making a deed, a peace treaty which can be underhanded or authentic made by a Notary. A Notary has to provide legal counseling and can answer any questions asked by his clients. He must not give wrong explanation which violates the law. His role in making peace treaty is to make authentic deed as stipulated in Article 16 of UUJN and to formulate the willingness and action of the persons appearing into the authentic deed. He also has to attach the register number of the Court in the peace treaty made before him. He is not liable for the content of the deed made before him; he is only responsible for its formal form according to legal provisions.*

***Keywords: Notary, Reconciliation Deed, Dispute Settlement***

### **I. Pendahuluan**

Sebagai makhluk sosial manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya dimana dalam setiap hubungan mempunyai hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, kadang kala timbul pertentangan dan perselisihan yang mengadakan hubungan hukum tersebut. Hukum yang berperan dalam setiap kehidupan manusia dapat mengatur atau mengubah suatu tata nilai dan cara pandang dalam suatu kelompok masyarakat.

Dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan modern sering terjadi sengketa, konflik atau perkara. Semakin majunya komunitas maka semakin kompleks sengketa yang terjadi.

Sejarah terjadinya sengketa sama tuanya dengan peradaban manusia, ketika kepentingan seorang manusia berbenturan dengan manusia lainnya, dan kedua belah pihak tidak berkeinginan untuk mengalah satu sama lain dengan berupaya sekuat

tenaga untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, maka kata “sengketa” adalah paling tepat untuk menggambarkan kejadian tersebut.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.<sup>1</sup>

Di dalam masyarakat Indonesia sendiri penyelesaian terhadap sengketa memerlukan suatu upaya untuk menyelesaikannya, baik upaya penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dengan menggunakan ketentuan hukum formal maupun melalui upaya di luar pengadilan (non litigasi). Adanya upaya untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, upaya ini dikenal dengan maupun upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Kondisi ini kemudian mendorong lahirnya ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.

Dalam hal seorang Notaris menjadi mediator, Notaris tersebut terikat oleh aturan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Notaris) Menurut UU Notaris, seorang notaris tidak boleh berprofesi yang mengganggu kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menyebabkan terjadi konflik kepentingan (*conflict interesting*).

Proses mediasi yang dilakukan seorang Notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat Notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Keuntungan lainnya jika Notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah menemukan jalan

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman I , 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung) hal 3.

keluar permasalahan karena Notaris memahami arah penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena Notaris tersebut sebagai pembuat akta perdamaian para pihak yang bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks permasalahan yang sedang terjadi.

Wewenang utama notaris yaitu untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dimana notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh notaris karena kedudukannya tersebut memperoleh sifat sebagai akta otentik.<sup>2</sup>

Akta perdamaian merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang mana mereka memintakan kekuatan hukum yang dibantu oleh mediator dalam menerima serta menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata)<sup>3</sup>, Pasal 130 HIR ayat 2 dan 3.<sup>4</sup>

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk* Retno wulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian.<sup>5</sup> Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130HIR.<sup>6</sup>

Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 48

<sup>3</sup> Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>4</sup> Pasal 130 HIR ayat 2 dan 3

<sup>5</sup> Retno wulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hal. 161

<sup>6</sup> M.R. Tresna, *Komentar HIR*, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hal. 130

<sup>7</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hal 164

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran notaris memberikan penyuluhan hukum terhadap sengketa yang terjadi antara para pihak ?
2. Bagaimanakah peran notaris dalam hal pembuatan akta perdamaian jika telah ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab notaris kepada para pihak terhadap akta perdamaian tersebut?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran notaris memberikan penyuluhan hukum terhadap sengketa yang terjadi antara para pihak.
2. Untuk mengetahui peran notaris dalam hal pembuatan akta perdamaian jika telah ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris kepada para pihak terhadap akta perdamaian tersebut.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini berifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normative (yuridis normatif). Sumber data penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Melalui penelitian kepustakaan diperoleh jenis data sekunder.<sup>8</sup> Data sekunder dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

1. Bahan hukum primer terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang, Ghalia Indonesia), 1996, hal 10

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2005) hal 30.

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tanggal 12 Agustus 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
  - d. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
  - e. Rechtreglement Voor De Buitengewesten ( R.B.G ) Reglemen Hukum Daerah Seberang.
  - f. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan
2. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan kamus lainnya.

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*field Research*).

### **III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Profesi yang memberikan penyuluhan hukum, antara lain advokat dan notaris. Advokat memiliki kewajiban penyuluhan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan notaris. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh advokat dapat berbentuk penyuluhan hukum berupa konsultasi yang diberikan kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, maupun secara langsung/berhadap-hadapan; sosialisasi berbagai aturan yang berlaku termasuk jasa hukum yang telah diberikan, dan advokat berhak menerima honorarium.

Notaris hanya memberikan penyuluhan kepada klien yang akan membuat akta kepadanya saja. Penyuluhan hukum notaris dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada para penghadap. Notaris harus menjelaskan isi akta

otentik yang telah dibuat. Tidak semua orang yang membuat akta autentik kepada notaris dapat memahami dengan baik akta itu. Notaris tidak menerima honorarium dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya.

Peranan seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dilakukan dalam rangka membantu dalam pembuatan akta otentik dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan dengan tegas bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Selain hal yang disebutkan diatas, di dalam Pasal 3 huruf a Rumusan Komisi D Bidang Kode etik Ikatan Notaris Indonesia Periode 1990-1993 bahwa anggota (notaris) wajib memberikan penyuluhan hukum kepada klien, sejauh mungkin sehingga klien itu dapat menangkap dan memahami penyuluhan tersebut, walaupun dengan diberikannya penyuluhan orang itu urung membuat akta atau urung menjadi klien dari anggota yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya saja di dalam memberikan suatu penyuluhan hukum, notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sebelum notaris memberikan penyuluhan hukum, ia harus mengerti dengan baik permasalahan yang dipertanyakan oleh klien kepadanya, agar notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan yang keliru atau tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam memberikan penyuluhan hukum notaris

---

<sup>10</sup> As'ad Sungguh, *25 Etika Profesi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 43-44.

harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, memberikan nasihat yang sesuai dengan undang-undang, dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak.

Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris berperan untuk selalu bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam undang-undang, serta merahasiakan segala keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari para penghadap atau kliennya kepada pihak lain.

Mengenai tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut, tentunya sangat erat kaitannya dengan pembuatan akta otentik. Dimana berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan istilah akta otentik dan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik, yaitu:

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
3. Pejabat umum oleh- atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Dengan demikian akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan atas pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan isi amar putusan. Namun dalam menyelesaikan sengketa tersebut para pihak malah menempuh jalan lain diluar isi putusan pengadilan tersebut untuk menyelesaikan sengketa secara damai diantara mereka, dengan membuat akta perdamaian yang di buat oleh pejabat lain yakni Notaris dengan alasan karena pelaksanaan atas eksekusi isi amar putusan pengadilan sulit untuk dipenuhi oleh para pihak sehingga para pihak

mengenyampingkan sebagian isi amar putusan pengadilan dengan cara membuat akta perdamaian secara Notarial. Akibat hukumnya, akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak wanprestasi. karena akta perdamaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Sebaliknya isi Putusan Pengadilan tetap mengikat para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa, apabila salah satu pihak tidak mengajukan banding atas isi putusan pengadilan tersebut.

Notaris juga harus mencantumkan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mencantumkan nomor register pengadilan tersebut dalam akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Dan dalam isi akta perdamaian tersebut juga memuat keinginan para pihak untuk melakukan perdamaian diluar pengadilan dengan mengabaikan isi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini di simpulkan dari ketentuan kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.

Berdasarkan pasal 1851 KUHPERdata yang menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tidaklah sah melainkan apabila dibuat secara tertulis, guna memenuhi hal tersebut maka di butuhkan seorang Notaris untuk membuat sebuah akta perdamaian



yang autentik, akta autentik merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian, yakni kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).<sup>11</sup>

Batasan tanggung jawab notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dan sebagai notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris yang berwenang untuk melaksanakan jabatannya sebagai notaris.<sup>12</sup>

Setiap akta perdamaian yang di buat oleh notaris disamping harus dihadiri oleh penghadap, juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUJN.<sup>13</sup>

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> R. Sugondo Notodisoeryo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta) hal. 55.

<sup>12</sup> Sjaifur rachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011) hal 192.

<sup>13</sup> Perhatikan ketentuan dalam Pasal 40 UUJN.

<sup>14</sup> Ima Erлие Yuana, Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010) Hal 42.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta perdamaian dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Kode etik notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Apabila notaris melakukan perbuatan pidana, UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam memberikan penyuluhan hukum notaris harus mengerti dengan baik permasalahan yang dipertanyakan oleh klien kepadanya, agar notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan yang keliru atau tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam memberikan penyuluhan hukum notaris harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, memberikan nasihat yang sesuai dengan undang-undang, dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak. Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris berperan untuk selalu bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku didalam undang-undang, serta merahasiakan segala keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari para penghadap atau kliennya kepada pihak lain dan selain itu dalam memberikan penyuluhan hukum notaris harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, memberikan nasihat yang sesuai dengan undang-undang, dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak.

- b. Notaris juga harus mencantumkan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mencantumkan nomor register pengadilan tersebut dalam akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Dan dalam isi akta perdamaian tersebut juga memuat keinginan para pihak untuk melakukan perdamaian diluar pengadilan dengan mengabaikan isi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Setiap akta perdamaian yang di buat oleh notaris disamping harus dihadiri oleh penghadap, juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUJN dan maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta perdamaian dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk

menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersengketa.

## **2. Saran**

- a. Melihat perkembangan dalam praktek notaris yang memberikan penyuluhan hukum atas permintaan dan keinginan para pihak maka notaris dapat dijadikan sebagai mediator terhadap masalah yang dikuasainya menurut jabatannya, dan notaris juga seharusnya mendapatkan honorarium terhadap penyuluhan hukum yang diberikannya mengenai penyelesaian sengketa dengan perdamaian.
- b. Notaris dalam pembuatan akta perdamaian seharusnya dapat mengarahkan keinginan para pihak agar salah satu para pihak tidak merasa dirugikan, dan notaris juga harus bersifat lebih netral dan tidak berat sebelah.
- c. Hendaknya Notaris dalam hal ini harus lebih teliti lagi didalam membuat Akta Perdamaian dengan memperhatikan segala hal dan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Undang-undang, sehingga segala macam potensi konflik yang terjadi dikemudian hari akibat dari pembuatan akta perdamaian tersebut tidak akan terjadi dan tidak mengakibatkan Akta tersebut batal demi hukum.

## **V. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2005).
- Notodisoeryo, R. Sugondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (PT Raja Grafindo Persada , Jakarta).
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003).

Sutantio, Retno wulan, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003).

Sungguh, As'ad, *25 Etika Profesi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004).

Sjaifur rachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011).

Usman I, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).

Tresna, M.R., *Komentar HIR*, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1975).

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang, Ghalia Indonesia), 1996.

Yuana, Ima Erlic, Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).

## **2. Peraturan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelessaian Sengketa, Tanggal 12 Agustus 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tanggal 15 Januari 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)